

## KOORDINASI PEMERINTAH DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KOTA MEDAN SUMATERA UTARA

Ramadanil\*

Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia  
[Danilharitd@gmail.com](mailto:Danilharitd@gmail.com)

Susilawati

Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia  
[susilawati@uinsu.ac.id](mailto:susilawati@uinsu.ac.id)

### ABSTRACT

*Background: The author focuses on the problem of high community mobility caused by the large number of motorists who use road facilities simultaneously during peak hours. If this is not supported by adequate facilities, it will cause new problems, namely congestion. Purpose: The purpose of this study is to analyze and describe Government Coordination in Overcoming Congestion in medan City, Central Java Province, identify and analyze the supporting factors and inhibiting factors of Government Coordination in Overcoming Congestion in Semarang City, Central Java Province, identify and analyze efforts to overcome impediments to Government Coordination. Regions in Overcoming Congestion in the City of Semarang, Central Java Province. Methods: This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach and an analysis of the coordination theory proposed by Taliziduhu Ndriba. Data collection techniques using in-depth interviews (7 informants), documentation and observation. Results/Findings: the factor that hinders coordination in overcoming congestion is the shortage of personnel from the transportation agency itself. The transportation agency cannot accept personnel freely due to the available budget, competence and ability of members and other factors. Conclusion: That the coordination carried out by the medanCity Transportation Service with related agencies is good and in accordance with the coordination theory by Taliziduhu Ndriba. The supporting factors and inhibiting factors for the coordination process came from internal and external to the Department of Transportation. Efforts made to overcome the inhibiting factors are optimizing the performance of coordinating implementers with a commitment to sincere work, smart work as well as by making innovations that can be useful for the development of the Department of Transportation in the future.*

**Keywords:** Coordination, Local Government, Department of Transportatio

### ABSTRAK

Latar Belakang: Penulis memfokuskan pada masalah mobilitas sosial yang besar karena ukuran jumlah pengemudi yang menggunakan layanan jalan pada waktu yang sama pada jam sibuk. Jika tidak didukung fasilitas yang memadai menimbulkan masalah baru yaitu kemacetan. Tujuan: Tujuannya Studi ini menganalisis dan mendeskripsikan koordinasi pemerintah dalam mengatasi kemacetan di Kota medan Kota, Provinsi sumatera utara, mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Koordinasi pemerintah untuk mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota medan Provinsi sumatera utara, mengidentifikasi dan menganalisis langkah-langkah untuk menghilangkan hambatan koordinasi pemerintah. Di daerah Mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota medan,. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis teori koordinasi saran Taliziduhu Ndriba. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam (7 informan), dokumentasi dan observasi. Hasil/Temuan:

Faktor-faktor yang menghambat koordinasi Bantuan kemacetan adalah kekurangan staf badan transportasi itu sendiri. Ini jasa transportasi tidak dapat dengan bebas menerima pekerja karena anggaran, keterampilan dan keterbatasan kemampuan anggota dan faktor lainnya. Kesimpulan: Pihak Semarang menyelesaikan koordinasi Layanan transportasi kota dengan institusinya baik dan terkoordinasi Teori Taliziduhu Ndrahah. Faktor pendukung dan penghambat koordinasi proses internal dan eksternal Kementerian Jalan. Upaya yang dilakukan mengatasi disinsentif yaitu mengoptimalkan koordinasi dedikasi yang tulus untuk bekerja, bekerja cerdas dan menerapkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat Pengembangan lebih lanjut dari Kementerian Jalan.

**Kata Kunci:** koordinasi, pemerintah daerah, Kementerian Jalan.

## PENDAHULUAN

**Indonesia** adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Deskripsi bentuk bumi Indonesia termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD) berdasarkan Pasal 4 (1) UUD. 1945, Pejabat Tinggi Administrasi Presiden Republik Indonesia. Di samping Ndrahah (2001: 85), "Fungsi pemerintahan kemudian diringkas menjadi dua (dua) jenis. function' yaitu: pertama papan memiliki tugas utama atau fungsi layanan mis penyedia layanan publik, baik layanan swasta maupun layanan publik, termasuk layanan birokrasi. Kedua dewan memiliki tugas kedua, yaitu. pemberdayaan, mis pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan.

Begitu luas dan Kompleksitas tugas dan tanggung jawab dewan membuat dewan bertanggung jawab yang sangat bagus. Selain sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas besar ini dukungan lingkungan, diperlukan kelembagaan yang kuat didukung oleh pejabat yang memiliki berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat dan pemerintahan. Pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah otonom. Sementara itu, pemerintah daerah melaksanakan tugas desentralisasi, desentralisasi dan pendampingan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab sebagai wakil pemerintah pusat di daerah otonom Pemerintah daerah menangani urusan yang semula menjadi urusan pemerintah pusat kewenangan pemerintahan daerah (desentralisasi) dengan menyepakati penyerahan kekuasaan pemerintahan pusat bagi gubernur sebagai kepala daerah yang juga bergerak secara vertikal di daerah (Desentralisasi) untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan ke daerah kewajiban pelaporan kepada pemerintah kabupaten dan akuntabilitas untuk kepatuhan tugas Kota medan memiliki permasalahan dengan mobilitas masyarakat yang tinggi alasannya adalah banyaknya pengemudi yang menggunakan ruang teh pada waktu yang sama selama satu jam sibuk Jika tidak didukung oleh perangkat keras yang tepat, itu akan menyebabkan Masalah baru adalah kemacetan lalu lintas.

Mobilitas masyarakat biasanya berbentuk manfaat perjalanan panjang atau pendek. Tindakan terapan adalah tindakan yang umum dan berkelanjutan seperti sekolah, kuliah, kerja dan belanja pada jalur transportasi darat dari satu kota ke kota lain. Selain itu, ada banyak ruang gudang dan pabrik terletak di Kota medan sedangkan pusat administrasi, pendidikan, niaga dan kesehatan Di sebelah selatan Kota medan, maka daerah pedalaman berada di sebelah utara, timur dan barat Kota medan. Dengan demikian, kota medan menjadi kawasan mega urban bagi sekitarnya. Perkembangan medan dalam beberapa tahun terakhir cukup signifikan dan signifikan munculnya

gedung pencakar langit di berbagai bagian kota. Perkembangan seperti itu ada menunjukkan peran strategis Kota medan sebagai salah satu penggerak perekonomian Nasional.

Bangunan-bangunan ini tersebar di seluruh kota dan terdiri dari gedung perkantoran, pusat perbelanjaan modern, hotel, dan area manufaktur. Jumlah pabrik Kota Semarang menjadi medan sebagai kota industri. Lambang kota industri adalah Kota medan sebagai kota dengan mobilitas tinggi karena banyaknya tenaga kerja ada di kota ini. Baik dari kota medan maupun dari kota medan sekitarnya pedalaman Masalah kemacetan adalah tanggung jawab pemerintah, bagaimana cara mengatasinya pemerintah dapat menyalurkan masalah menjadi solusi. Pemerintah pusat tidak bisa melanjutkan masalah ini karena di luar kota medan dan jika ada masalah di dalam kota dikelola oleh pemerintah pusat, butuh waktu lama untuk berada di lapangan solusi cepat diperlukan agar komunitas dapat berfungsi dengan baik. Karena Pemerintah daerah langsung menangani masalah ini.

## **RENTANG MASALAH YANG DIRANCANG**

Masalah koordinasi pemerintah untuk mengatasi kemacetan kota medan, di provinsi sumatra utara, yaitu. Kota medan, merupakan kota perdagangan dan jasa, kemudian banyak penduduk yang berprofesi sebagai pegawai dan pekerja di sektor industri dengan jumlah yang banyak mencapai 60,59% usia kerja pada tahun 2020. Terdapat 9 (sembilan) kecamatan di Kota medan industri yaitu Kawasan Industri Lamicitra Nusantara, Kawasan Industri Wijayakusuma, Kec Industri Terboyo, Kawasan Industri Bukit medan, Kawasan Industri Sinar Central Cipta, Kawasan Industri Candi, Kawasan Industri Tugu, Kawasan Industri Kecil Bugangan Baru dan Kawasan Industri Guna Mekar Tambak Aji dengan 1.029 hektar budidaya di kota atau mencapai 75% dari luas kota medan. Data menunjukkan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk dikota medan . Tapi tingkat keramaian yang sebenarnya.

Hal ini dikarenakan ada orang yang bekerja di bidang lain yang ikut serta dalam kegiatan kota medan 9 di kawasan industri. Mobilisasi tersebut berlangsung dari kota-kota sekitar yaitu Kabupaten, deli serdang setia budi , tembung , amplas . Dimana para pekerja banyak di kota medan dan banyak lagi yang tidak memiliki tempat tinggal tetap memilih berlari atau mengemudi daripada memiliki rumah di kota medan . Alasan-alasan ini tentu bukan satu-satunya alasan mobilitas penduduknya sangat ramai. Kota medan secara geografis terbagi menjadi dua bagian, yaitu dataran rendah (kota bawah) dan juga dataran tinggi (kota atas). Kota bawah adalah pusatnya pemerintah, bisnis dan industri, sedangkan Kota Atas sebagian besar merupakan bagian dari kabupaten perkebunan dan sawah. Penduduk medan Atas biasanya memiliki kesibukan di medan..

Turun dan sebaliknya. Alasannya adalah kesibukan sekolah, pekerjaan dan juga mencari kesenangan. Di Kota medan kemacetan selalu terjadi pada jam sibuk dan di tempat lain . Dengan mobilitas warga luar kota medan yang datang dan pergi pada jam kerja seperti ini kemacetan lalu lintas tidak dapat dihindari.

## **METODE PENELITIAN**

Menurut Simangunsong (2017:231), Data yang didapat dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata bukan angka yang diperoleh dari hasil dari wawancara dan didukung dengan catatan dari hasil lapangan, dokumentasi, rekaman, dan pendukung lainnya. Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dikarenakan pendekatan kualitatif mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang

diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Koordinasi Pemerintahan Dalam Mengatasi Kemacetan di Kota medan sumatera utara ini.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Perhubungan Kota medan, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota medan, Bagian ATCS Dinas Perhubungan Kota medan, Kepala Bidang Pengendalian dan Ketertiban Dinas Perhubungan Kota medan, Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan Kota medan, Satlantas Polrestabes Kota medan dan Kepala Dina Pekerjaan Umum Kota medan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis Koordinasi Pemerintahan Dalam Mengatasi Kemacetan di Kota medan menggunakan teori dari Taliziduhu Ndraha. Teori tersebut memiliki 7 indikator dalam mengukur koordinasi pemerintahan yaitu Informasi Komunikasi dan Teknologi

Informasi, Kesadaran Pentingnya Koordinasi, Kompetensi Partisipan, Kalender Pemerintahan, Kesepakatan dan Komitmen, Penetapan Kesepakatan Oleh Pihak Yang Berkoordinasi, Insentif Koordinasi dan Feedback. Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut :

### **Informasi, Komunikasi dan Teknologi Informasi**

Informasi adalah sekumpulan fakta atau data yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Komunikasi adalah proses pada seseorang untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain dengan memberikan pengertian. Teknologi Informasi adalah istilah untuk teknologi dalam bentuk apapun yang membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan dan atau menyebarkan informasi. Pemerintah Kota medan melalui Dinas Perhubungan sudah memiliki dasar hukum untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu Peraturan Walikota nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja

Perangkat Daerah. Dinas Perhubungan sendiri memiliki 5 bidang yaitu sekretariat, lalu lintas, pengendalian tata tertib, bidang angkutan dan bidang parkir. Koordinasi dilakukan secara internal maupun eksternal. Secara horizontal, komunikasi yang dilakukan yaitu dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia Resort Kota medan pada bagian Satuan Lalu Lintas.

### **Kesadaran Pentingnya Koordinasi**

Pentingnya koordinasi telah disadari sejak lahirnya peradaban dan budaya manusia. Koordinasi sendiri berarti proses penyepakatan Bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsur yang berbeda dengan sedemikian rupa sehingga semua kegiatan terarah pada pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan dan disisi lain keberhasilan yang satu tidak merusak keberhasilan yang lain. Ndraha (2015:291). Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dapat dikatakan bahwa pegawai memiliki pengetahuan maupun kemampuan yang baik. Dilihat dari terdapat pegawai yang bekerja sesuai dengan bidangnya. Di Dinas Perhubungan kota medan sendiri diisi oleh alumni dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat yang berarti masing-masing orang memiliki pengetahuan yang lebih dari cukup untuk bekerja sebagai pegawai di bidang perhubungan. Begitu pula dengan yang bekerja yang ada di masing-masing bidang, sesuai dengan posisi yang dijabat. pelaksanaan koordinasi pada setiap job-desk sudah baik didalam maupun diluar Dinas Perhubungan Kota medan. Masing masing bidang yang ada saling membantu dan bekerja

sama dalam menyelesaikan suatu permasalahan melalui rapat internal. Setiap instansi atau bidang yang terkait siap memberikan bantuan untuk turun langsung ke lapangan membantu menyelesaikan masalah yang ada. Koordinasi dapat dilakukan dengan mudah karena mengerti tugas masing-masing sehingga jelas untuk dapat meminta bantuan apa kepada siapa.

#### Kompetensi Partisipan, Kalender Pemerintahan

Berdasarkan jabatan yang telah dimiliki. Kompetensi dari pegawai dapat menentukan kinerja dinas. Maka pegawai harus memiliki kompetensi yang baik dan sesuai dengan bidang yang dimiliki.sumber daya manusia yang ada di Dinas Perhubungan Kota medan sudah sangat mumpuni karena sebagian besar memang memiliki disiplin ilmu yang sesuai. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari adanya sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan yang dipersiapkan untuk menjadi tenaga terampil di Dinas Perhubungan. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan penulis, kedisiplinan diperlukan agar koordinasi dapat berjalan dengan baik. Kedisiplinan disini yaitu tentang kehadiran dalam rapat. Walaupun tidak selalu dapat hadir karena kendala satu lain hal, akan tetapi selalu ada yang mewakili dan wakil tersebut memang ahli sehingga saat rapat dapat berkontribusi pendapat dengan baik.

#### Kesepakatan dan Komitmen

Dibutuhkan kesesuaian kehendak antara satu pihak dengan pihak lain dalam melakukan suatu kegiatan. Merasa bahwa memiliki keterikatan untuk terus berupaya menjalin hubungan baik antar instansi terkait. Berdasarkan data yang didapat bahwa sering dilakukan pertemuan yang sifatnya formal, yaitu dengan melakukan rapat. Tetapi agenda pertemuan yang dilakukan secara informal juga ada yang biasanya dilakukan secara insidentil ketika berada dilapangan. Kegiatan pertemuan dalam upaya menuju kesepakatan sering dilakukan tetapi tidak secara rutin lebih kepada situasional.

Pertemuan yang sering dilakukan adalah forum koordinasi lalu lintas dan angkutan jalan tidak terjadwal namun sesuai dengan isu terbaru yang ada. Selain itu sering dilakukan pertemuan yang sifatnya formal, yaitu dengan melakukan rapat. Tetapi agenda pertemuan yang dilakukan secara informal juga ada yang biasanya dilakukan secara insidentil ketika berada dilapangan. Selain rapat,dilakukan juga koordinasi dengan surat menyurat yang tentunya dengan bahasa kan ketentuan surat formal.

#### Penetapan Kesepakatan Oleh Pihak Yang Berkoordinasi

Setelah suatu bentuk kerjasama dibangun setelahnya terdapat kesepakatan yang harus ditepati dan diikuti oleh para pembuat kesepakatan. Kesepakatan kerjasama dibuat ketika suatu pihak tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis dapat diketahui bahwa setelah penetapan kesepakatan dibuat, selalu ada bukti dari penetapan kesepakatan. Bukti ini dapat secara lisan disampaikan, berupa berita acara atau dalam bentuk notulensi yang nantinya menjadi pedoman dalam melakukan tindak lanjut. Notulensi yang ada diberikan kepada seluruh pihak yang terkait. Selain itu pelaksanaan kegiatan setelah adanya ketetapan selalu dilaksanakan dan setelah itu di evaluasi pelaksanaannya.

Hal ini dilakukan karena ada target yang harus diselesaikan. Tindaklanjut ini berdasarkan pada hasil rapat yang telah dilakukan sebelumnya yang telah diwakilkan atau disuarakan apa saja yang menjadi masalah dan kendala oleh tiap perwakilan instansi yang terlibat dalam rapat.

## Insentif Koordinasi

Reward and Punishment dilakukan oleh beberapa instansi pemerintahan agar target yang harus dicapai dapat selesai secara maksimal tanpa harus terus menerus memberikan tekanan karena para pelaksana merasa memiliki tugas yang harus diselesaikan. Ada insentif bagi para pelaksana kegiatan koordinasi. Tetapi kembali kepada dinas masing-masing diadakan atau tidaknya sistem Reward. Terdapat reward yang diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kedisiplinan yang telah ditunjukkan oleh para pelaksana koordinasi. Namun dapat juga ditemukan sanksi bagi para pelanggar kegiatan koordinasi. Terdapat sanksi yang diberikan sebagai bentuk hukuman atas pelanggaran kedisiplinan yang telah ditunjukkan oleh pelaksana.

## Feedback

Tanggapan yang diberikan kepada para pelaku kebijakan oleh masyarakat dapat berupa tanggapan baik maupun tanggapan buruk. Kembali lagi kepada bagaimana pelaksanaan kebijakan dilakukan. Respon yang diberikan masyarakat sangat baik terhadap upaya pemerintah dalam hal ini Dinas Perhubungan dalam mengatasi kemacetan yang terjadi di Kota medan. Masukan diberikan oleh masyarakat dengan menggunakan media sosial sebagai tempat berkomunikasinya antara pemerintah dan masyarakat secara luas. Selanjutnya terdapat perubahan terhadap hasil kesepakatan.

Evaluasi ini dilakukan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Terdapat evaluasi yang dilakukan dalam jangka pendek, menengah maupun Panjang. Kegiatan evaluasi ini dapat dilakukan setelah rapat lanjutan untuk kemudian dilakukan peninjauan ke lapangan.

## Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Lembaga terkait dalam Mengatasi Kemacetan di Kota medan sudah memiliki dasar hukum untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dalam mengatasi kemacetan, Dinas Perhubungan melakukan komunikasi baik internal maupun eksternal dengan beberapa instansi lain baik secara horizontal maupun secara vertikal. Telah menggunakan Teknologi yang digunakan dalam berkoordinasi mengatasi kemacetan di Dinas Perhubungan Kota medan dengan Area Traffic Control System (ATCS) yang memiliki banyak kamera cctv diberbagai wilayah Kota medan.

Koordinasi ini sudah berjalan cukup efektif seperti temuan R. Rijal (R. Rijal, 2019), namun program ini juga masih mempunyai kekurangan yaitu kekurangan personil dari dinas perhubungan itu sendiri. Dinas perhubungan tidak dapat merekrut personil dengan bebas karena ini akan menyangkut anggaran, kompetensi serta kemampuan dari anggota dan faktor lainnya. Selain itu, Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ini berbeda dari penelitian Sitti S. Syamel (Sitti S. Syamel, 2020) dimana telah mengadakan pertemuan secara langsung bersama pihak yang terkait untuk mencari solusi. Selain itu dapat melalui media sosial sebagai tempat untuk masyarakat menyalurkan saran dan masukannya.

## Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan hambatan dalam Koordinasi Pemerintahan Dalam Mengatasi Kemacetan di Kota medan yaitu tidak seimbangnya pertumbuhan kendaraan dengan pertumbuhan ruas jalan yang ada. Walalupun dibangun banyak jalan tol akan tetapi apabila jumlah kendaraan

yang baru juga melonjak maka kedepan juga akan menyebabkan kemacetan.Kemacetan bisa terjadi bukan hanya di ruas jalan umum, bahkan bisa terjadi di jalan tol yang merupakan jalan bebas hambatan. Selain itu peran pemimpin dalam sebuah organisasi. Dengan perbedaan gaya kepemimpinan, kebijakan yang diambil juga akan berbeda. Terkadang kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin baru dapat bertentangan dengan kebijakan yang ditinggalkan oleh pemimpin lama. Sehingga jajaran dibawah harus dapat menyesuaikan dengan gaya kepemimpinan yang baru.

## KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan Bawa koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota medan dengan instansi terkait sudah baik dan sesuai dengan teori koordinasi olehtaliziduhu Ndraha.Faktor pendukung dan faktor penghambat proses koordinasi berasal dari internal dan eksternal Dinas Perhubungan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat ialah mengoptimalkan kinerja pelaksana koordinasi dengan komitmen kerja ikhlas kerja cerdas juga dengan melakukan inovasi yang dapat berguna bagi perkembangan Dinas Perhubungan kedepannya.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Pemerintahan Kota medan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Taliziduhu Ndraha.**Arah Masa Depan Penelitian (future work):** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian,oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Koordinasi Pemerintahan Dalam Mengatasi Kemacetan di Kota medan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintahan Kota medan Provinsi sumatera utara beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asfiati, Sri, and Zurkiyah Zurkiyah. "Pola Penggunaan Lahan Terhadap Sistem Pergerakan Lalu Lintas Di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan." Seminar Nasional Teknik (SEMNASTEK) UISU. Vol. 4. No. 1. 2021.
- Indrayani, Indrayani, and Sri Asfiati. "Pencemaran Udara Akibat Kinerja Lalu-Lintas Kendaraan Bermotor Di Kota Medan." Jurnal Permukiman 13.1 (2018): 13-20.
- Lubis, Marwan. *Studi Manajemen Lalu Lintas Meningkatkan Kinerja Jaringan Jalan Pada Daerah Lingkar Dalam Kota Medan*. Diss. Universitas Sumatera Utara, 2007.
- Ndraha, Taliziduhu. 2015. Kybernetology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 2. Jakarta : PT Rineka Cipta.65.
- Purba, Erick A., Joni Harianto, and S. Pengajar. "Pengaruh Gerak U-Turn Pada Bukaan Median Terhadap Karakteristik Arus Lalu Lintas Di Ruas Jalan Kota (Studi Kasus: Jl. Sisingamangaraja Medan)." *Teknik Sipil, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia* (2013).
- Rijal. R. 2019. Koordinasi Dinas Perhubungan dan Satuan Lalu Lintas dalam Penanggulangan Kemacetan Kota medan. Matra Pembaruan : Jurnal inovasi kebijakan Vol 3 No 1
- Sembiring, Zulfikar. "Fuzzy Linier Programming untuk Pemilihan Jenis Kendaraan dalam Mengantisipasi Kemacetan Lalu Lintas di Kota Medan." Jurnal Teknovasi: Jurnal Teknik dan Inovasi Mesin Otomotif, Komputer, Industri dan Elektronika 4.1 (2017): 59-69.

- Septiansyah, M. V. M., & Wulansari, D. N. (2018). Analisa Kinerja Ruas Jalan Medan Merdeka Barat, DKI Jakarta. *Jurnal Kajian Teknik Sipil*, 3(2), 110-115.
- Septiansyah, M. Vikri M., and Dwi Novi Wulansari. "Analisa Kinerja Ruas Jalan Medan Merdeka Barat, DKI Jakarta." *Jurnal Kajian Teknik Sipil* 3.2 (2018): 110 -115.
- SEPTIANSYAH, M. Vikri M.; WULANSARI, Dwi Novi. Analisa Kinerja Ruas Jalan Medan Merdeka Barat, DKI Jakarta. *Jurnal Kajian Teknik Sipil*, 2018, 3.2: 110-115.
- Simangunsong, Fernandes. 2017. Metodelogi Penelitian Pemerintahan medan
- Syamel. Sitti S dkk. 2020. Koordinasi Dinas Perhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas di Kota medan. *Jurnal of Public Policy and Management* Vol 2 No 1
- Wahyuni, Rida. *Pengaruh Parkir pada Badan Jalan terhadap Kinerja Ruas Jalan (Study Kasus: Jalan Brigjen Katamso Sekolah Harapan Mandiri Medan)*. Diss. Universitas Sumatera Utara, 2008.